

## **BAB V**

### **Penutup**

#### **5.1 Kesimpulan**

Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Longkoga Timur tahun 2014, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Longkoga Timur telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi dan sesuai dengan 113 tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Selain itu dalam forum musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan didesa terkait.
2. Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Longkoga Timur menurut hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan di desa dinyatakan belum sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014 karna dianggap tidak transparan dan akuntabel dalam pelaporan anggaran yang ada di RAB dan data anggaran di lapangan.
3. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapatkan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

## **5.2 Keterbatasan**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu:

1. Jam kerja yang diterapkan oleh perangkat desa yang bersangkutan kurang efektif sehingga peneliti mengalami kesulitan saat melakukan wawancara kepada informan.
2. Kurangnya informan dalam pengumpulan data melalui wawancara yaitu masyarakat desa.

## **5.3 Saran**

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka saran dari penelitian ini yaitu:

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan informan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Ira dan Nur Azlina.** 2014. *Pengaruh Good Governance, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (studi pada pemerintah daerah kabupaten Kampar)*. Jurnal: Universitas Riau
- Andrianto, Nico.** 2007. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Public Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Arista, Widiyanti.** 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kadung di Kecamatan Wonongan Kabupaten Pasuruan)*. Skripsi. Universitas Islam Negri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Dwi Febri, Arifiyanto dan Taufik, Kurohman.** 2014. *Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di kabupaten Jember*. Jurnal Riset .
- Elgia, Astuti dan fanida, Eva H.** 2013. *Akuntabilitas pemerintah desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) (studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*. Jurnal. Universitas Negri Surabaya
- Indrianto, Nur, dan Bambang Supomo.** 1999. *Metodologi Penelitian dan Bisnis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Kaelan.** 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma
- Lestari, Ayu Komang D; dkk.** 2014. *Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kututambahan Kecamatan Buleleng Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintah)*. E-jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Volume 2. Nomor 1.
- Mardiasmo.** 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI
- Moleong, Lexy J.** 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

\_\_\_\_\_. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

**Nafidah, Lina Nasihatun, dan Mawar Suryaningtyas.** (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. (Vol.3, No. 1)

**Nasirah.** 2016. *Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Studi Pada Desa Mulya Agung Kecamatan Dau)*. Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Malang.

**Ompi, Atika Wulan.** 2012. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan desa (studi di Desa Pangu Kec. Ratahan Kab. Minahasa Tenggara)*

**Prabawa, Akbar.** 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara*. Vol. 3 No.1, hal 227-238. Di akses pada tanggal 5 Desember 2019 di [ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id)

**Rahma, Yulita.** 2016. *Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu*. JOM Vol. 3. No. 2, [http://media.neliti.com/media/media\\_publication](http://media.neliti.com/media/media_publication).

**Sanusi, Anwar.** 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat

**Subroto, Agus.** 2009. *Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana desa (Studi Kasus pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.

**Sugiyono.** 2013. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

**Sumpeno, Wahjudin.** 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.

**Syachbrani, Warka.** 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*. Tugas akhir Mata Kuliah. Program Magister Sains Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

**Thomas.** 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.* Dipublikasikan. Skripsi. Program S1 Pemerintah Integratif. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Mulawarman.

Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 Tentang *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*

Peraturan Bupati Banggai Provinsi Sulawesi Tengah No. 3 tahun 2011 tentang *pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang *pengelolaan keuangan desa.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015. *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.*

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.